



RENSTRA

TAHUN 2025 – 2029

DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH DATAR

Alamat :
Jalan MT. Haryono Nomor 10 Batusangkar



(0752) 574715



08116616149



www.Tenaga Kerja dan Perindustrian.tanahdatar.go.id



1708



dTenaga Kerja dan Perindustriantahdatar@gmail.com

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah –Nya sehingga dapat menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 – 2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 – 2029, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis 5 (lima) tahunan yang menggambarkan visi, misi, analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 – 2029 ini berisi pedoman pelaksanaan pembangunan dan ketentuan-ketentuan lain yang berpedoman pada Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 – 2029 yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan Rencana Kerja tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 – 2029 ini diharapkan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Tanah Datar dalam lima tahun kedepan.

Kami menyadari Dokumen Rencana Strategis ini belum dapat memenuhi harapan semua pihak, karena itu masukan, kritik dan saran untuk perbaikan akan kami terima dengan terbuka.

Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap Rancangan Rencana Strategis ini dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan. Semoga Allah S.W.T. senantiasa memberikan petunjuk dalam mewujudkan visi, misi serta pencapaian sasaran yang ditetapkan di dalam Renstra ini.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH DATAR



Drs. SUHERMEN
NIP. 19660609 198602 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk jangka waktu 5 tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra Perangkat Daerah setidaknya mencakup analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD

Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sedangkan fungsi dari Renstra OPD adalah sebagai acuan perencanaan bagi OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian memiliki kedudukan strategis yaitu berfungsi untuk menjembatani antara perencanaan OPD dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) sebagai implementasi dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) yang merupakan satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi dan program

yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Tanah Datar tahun 2025-2029.

Renstra dapat dijadikan sebagai landasan operasional dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan guna mencapai tujuan organisasi serta dapat mewujudkan tingkat kepuasan maksimal masyarakat. Adanya Renstra dan Renja Dinas NAKERIN diharapkan juga memberi arah dalam memberikan pelatihan kepada pencari kerja pemula dalam meningkatkan kompetensi di bidang yang dibutuhkan dan juga fasilitasi permasalahan tenaga kerja dan juga menjadikan IKM yang ada di Nagari yang ada dapat menjadi IKM yang berkembang dan mandiri sesuai dengan potensi yang ada di Nagari sehingga mampu menggerakkan kegiatan perekonomian masyarakat secara luas, merata dan berkeadilan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar 2025-2029, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

- g. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 01 tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian serta tata kerja Dinas Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029 Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar adalah :

- 1) Pedoman bagi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan program sebagai amanah visi dan misi RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 2) Dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan terciptanya tujuan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- 3) Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan, baik secara internal maupun eksternal.
- 4) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.
- 5) Menjadi kerangka dasar bagi Dinas NAKERIN dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
- 6) Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan;

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas NAKERIN Kabupaten Tanah Datar adalah

- 1) Terciptanya hasil akhir dari program dan kegiatan yang tercakup harus sinergis mendukung sasaran pembangunan daerah.

- 2) Sebagai bahan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja tahunan dan periode lima tahunan.
- 3) Sebagai pedoman penyusunan penetapan kinerja.
- 4) Terciptanya hubungan antara keluaran (*output*) dari masing-masing kegiatan dengan hasil (*outcome*) dan selanjutnya dengan dampak (*impact*) harus benar dan lengkap.
- 5) Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Dinas YTenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Tanah Datar periode 2025-2029;
- 6) Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 93 penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, paling sedikit mencakup sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah.
- 1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

- 1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- 1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

- 2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih di hadapi dan dinilai perlu di atasi melalui renstra perangkat daerah ini.
- 2.1.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
- 2.1.2 Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan aset.
- 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Bagian ini menunjukkan Tingkat capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian berdasarkan sasaran / target renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian periode sebelumnya.
- 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2 Permasalahan dan isu-isu strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
 - 2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2.2.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah tersebut yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan perangkat daerah.

2.2.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi Kabupaten/Kota

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Propinsi, Kabupaten/Kota.

2.2.4 Penentuan Isu-isu strategis

Penentuan isu-isu strategis dengan mereview faktor faktor pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Setiap tujuan dan sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur serta rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA BIDANGN URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan induktif serta mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH DATAR

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Keberadaan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar berpedoman kepada Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 01 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tujuan dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru dengan tipe B terdiri dari 1 (satu) Sekretaris, 2 (dua) Bidang pelayanan dan memiliki 3 (tiga) Unit Pelayanan Terpadu (UPT).

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sesuai dengan Perda No.1 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar seperti Struktur sebagai Berikut

1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Tenaga Kerja,
4. Bidang Perindustrian
 - 1) Seksi Energi dan Sumber daya mineral
5. Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dan,
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan dana melakukan koordinasi urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Perindustrian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Tugas dan Fungsi

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok tersebut maka Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar mempunyai fungsi

sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas di Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Perindustrian.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan Tenaga Kerja dan Bidang Perindustrian.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar diuraikan sebagai berikut ;

1. Kepala Dinas :

Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal, bidang ketenagakerjaan serta bidang energi dan sumber daya mineral yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang tenaga kerja dan Perindustrian;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang tenaga kerja dan Perindustrian;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang tenaga kerja dan Perindustrian; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris :

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas.

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. koordinasi penyusunan, rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan dinas;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtangaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
- c. penataan organisasi dan tata laksana;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan e.

Pengelolaan barang milik/ kekayaan Daerah dan

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat membawahi 3 (tiga) sub bagian, diantaranya:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas urusan ketatausahaan, Pengendalian surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan aset, humas, protokol, bahan penyusunan kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, gaji berkala, pendidikan dan latihan, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi umum dan kepegawaian Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah:

- a. menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- b. menghimpun kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;

- d. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- f. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- g. melakukan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian melalui Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- h. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Sub Bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- j. melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana;
- k. melaksanakan administrasi pengurusan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan dan koordinasi penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan menyelenggarakan pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah:

- a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- b. menyusun program dan rencana pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. memproses dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan;
- d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
- e. menyiapkan bahan pertanggungjawaban dan laporan keuangan ;
- f. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan dinas;
- g. menyiapkan dan memelihara dokumen keuangan
- h. mengelola data dan informasi;
- i. monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- j. menyusun laporan Sekretariat dan Dinas;
- k. melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas Seksi Energi Sumber Daya Mineral adalah:

- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
- b. menyusun rencana dan program kerja seksi ESDM;
- c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. melakukan pemetaan potensi dan perencanaan pemanfaatan energi sumber daya mineral;
- e. melakukan pengusahaan energi sumber daya mineral;
- f. melakukan pengawasan energi sumber daya mineral;
- g. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- h. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Bidang Tenaga

Bidang tenaga kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi;
- b. verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- c. pengoordinasian peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta,
- d. penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- e. pengoordinasian pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil,
- f. pengoordinasian pengukuran produktivitas tingkat Daerah,
- g. pengoordinasian pemantauan tingkat produktivitas,
- h. pengordinasian pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- i. pengoordinasian penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- j. pengoordinasian perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat,
- k. promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
- l. pengoordinasian pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon tenaga kerja Indonesia;
- n. pengoordinasian pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;
- m. pengoordinasian penyelesaian permasalahan tenaga kerja Indonesia pra dan purna penempatan;
- p. pengoordinasian pelayanan pemulangan dan kepulangan tenaga kerja Indonesia;
- q. pelaksanaan pemberdayaan tenaga kerja Indonesia purna;
- r. verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi Daerah;
- s. pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersarna Daerah;
- t. koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi Daerah,
- u. koordinasi pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
- v. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerja sama bipartit di perusahaan;
- w. koordinasi pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan; dan
- x. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bidang Perindustrian

Bidang perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang perindustrian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Perindustrian membawahi 1 (satu) seksi, antara lain:

- 1) Seksi energi dan sumber daya mineral
- Seksi energi dan sumber daya mineral dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja seksi energi dan sumber daya mineral;
 - b. pemetaan potensi dan perencanaan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral;
 - c. pengusahaan energi dan sumber daya mineral;
 - d. pengawasan energi dan sumber daya mineral; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dapat dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas.

2.1.2 Sumber Daya

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 62 (enam puluh empat) orang. terdiri dari:

- 1. PNS : 32 Orang
- 2. THL : 32 Orang

Tabel 2.1

Sumber Daya Manusia

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Tanah Datar

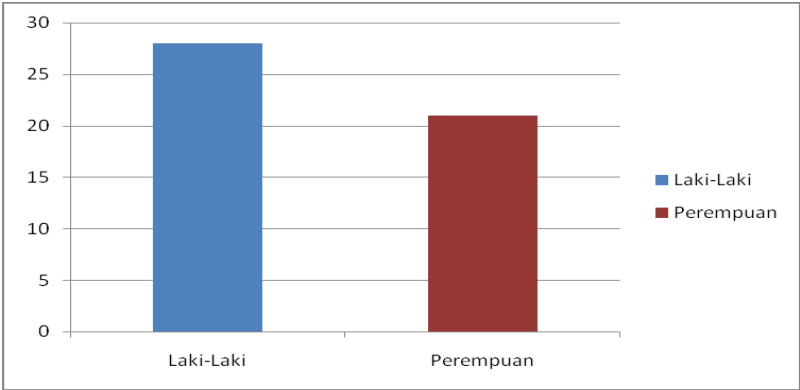
NO	PENEMPATAN	JUMLAH
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretariat	6
3	Bidang Tenaga Kerja	5
4	Bidang Perindustrian	11
5	UPT BLK	9
8	Tenaga Harian Lepas	32
JUMLAH		64

Grafik 2.1

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Kabupaten Tanah Datar



Tabel 2.2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Kabupaten Tanah Datar

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	2	3
1.	S2	1
2.	S1	25
3.	Diploma	1
4.	SLTA	1
5.	SLTP	1
6.	SD	1

Tabel 2.3

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan/Pangkat

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Kabupaten Tanah Datar

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Golongan IV/c	1
2.	Golongan IV/b	0
3.	Golongan IV/a	3
4.	Golongan III/d	7
5.	Golongan III/c	6
6.	Golongan III/b	5
7.	Golongan III/a	4
8.	Golongan II/d	1
9.	Golongan II/c	1
10	Golongan II/a	1
11	Golongan I/d	1

Sarana dan Prasarana (Aset/ Modal)

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mempunyai sarana dan prasarana sebagaimana berikut :

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Tanah Datar

NO	Nama/ Jenis Barang	Jumlah
1.	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	4
2.	Sepeda Motor	3
3.	Global Positioning System	1
4.	Mesin Ketik Manual Portable(11-13)	1
5.	Mesin Ketik Manual Manual	1
6.	Rak Kayu	1
7.	Filling Besi/Metal	4
8.	Lemari kayu	9
9.	Alat Penghancur Kertas	1
10.	Papan Nama Instansi	2
11.	Papan Pengumuman	1
12.	Mesin Absensi	1
13.	Meja Kayu/Rotan	1
14.	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	1
15.	Meja Rapat	1
16.	Meja Resception	1
17.	Meja Panjang	1
18.	Kursi Rapat	5
19.	Kursi Tamu	7
20.	Kursi Putar	7
21.	Kursi Lipat	3
22.	Meja Komputer	2
23.	Kursi Fiber Plastik	1

24.	Meja Cetak	1
25.	Alat Dapur Lainnya (Tikar)	1
26.	Meja ½ Biro	18
27.	Sofa	1
28.	MOUBILER LAINNYA(Partisi)	1
29.	AC Split	2
30.	Kipas Angin	1
31.	Televisi	2
32.	Sound System	1
33.	Camera Video	2
34.	Camera Film	1
35.	Tangga Alumunium	1
36.	Local Area Network (LAN)	1
37.	P.C Unit	10
38.	Komputer Jaringan Lainnya	2
39.	Lap Top	7
40.	Note Book	5
41.	Hard Disk	1
42.	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	1
43.	Printer	11
44.	Scanner	1
45.	Server	1
46.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1
47.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1
48.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1
49.	Meja Rapat Pejabat Lainnya	2
50.	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	1

51.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3
52.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2
53.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2
54.	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	2
55.	Lemari Buku untuk Perpustakaan	2
56.	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	6
57.	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	1
58.	Proyektor + Attachment	2
59.	Unintemuptible Power Supply (UPS)	2
60.	Camera Electronic	2
61.	Alat Penyimpan Data	1
62.	Compas Geologi	1
63.	Kompas	1
64.	Facsimile	1
65.	All Band Receiver	1
66.	Geological Hammaer	1
67.	Stabilizer	3
68.	Layar	1
69.	Range Finder	1
70.	Oven	1
71.	LCD Proyektor / Infocus	3
72.	Mesin Jahit	1
73.	Distilling Apparatus	3
74.	Alat Kantor Lainnya (CCTV)	1
75.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Gorden Jendela)	1
76.	Solder Listrik	1

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Keberhasilan merupakan sesuatu yang bersifat relatif dan sulit diukur sehingga untuk mengetahui keberhasilan perlu dibuat indikator- indikator yang lebih dapat diukur. Oleh karena itu Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar menetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur untuk dapat menilai keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan.

Indikator kinerja merupakan hal yang bersifat dinamis karena akan tergantung pada perkembangan kondisi, peraturan, anggaran, kebijakan dan lain-lain. Pencapaian terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan akan memberi gambaran tentang sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang diembannya. Berikut Kinerja Pelayanan Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar berdasarkan bidang sesuai dengan indikator kinerja yang di capai sampai tahun 2020 sebagai berikut :

Untuk sektor Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar, Potensi Energi yang terbarukan terdapat pada lokasi dapat dijabarkan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.6
Potensi Energi yang terbarukan di Kabupaten Tanah Datar

No	PotensiEnergi	Tahun / Lokasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	PLTM	4	3	-	-	-
2.	Pico Hidro	2	-	-	-	-
3.	Penelitian PLTM	-	-	-		-
4.	PanasBumi	3	-	-	-	-

Tingkat capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian pada bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilihat berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis (Renstra) pada periode sebelumnya yakni periode tahun 2016-2020. Terdapat pengurangan indikator kinerja pasca terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, yakni indikator kinerja yang berkaitan dengan kewenangan bidang Energi Sumber Daya Mineral seperti Migas, Geologi Kebencanaan, Air Tanah, Energi dan Kelistrikan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi kecuali pemanfaatan langsung panas bumi dalam kabupaten, sehingga beberapa Indikator Kinerja tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya.

Grafik 2.4
Jumlah Rasio Elektrifikasi
di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2020



Dari grafik Rasio Elektrifikasi diatas dapat terlihat bahwa jumlah rumah yang teraliri listrik dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sebesar 1.91% dari sebesar 91.48% dari tahun 2016 menjadi 93,39% di tahun 2020.

Sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan Rasio Elektifikasi Nasional, Kementrian ESDM saat ini sedang giat mengembangkan potensi energi yang terdapat diberbagai daerah. Kementerian ESDM juga akan mengembangkan program listrik pedesaan

yang merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang ketenagalistrikan untuk perluasan akses listrik pada masyarakat.

Dalam mendukung program pemerintah pusat untuk meningkatkan Rasio Elektrifikasi, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selalu berusaha menjaga ketersediaan pasokan listrik di seluruh wilayahnya. Jika dilihat dari perhitungan Rasio Elektrifikasi Tanah Datar dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 seperti grafik diatas, memberikan gambaran bahwa terjadi peningkatan Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga di Tanah Datar.

Pelaksanaan perhitungan Rasio Elektrifikasi ini dimaksudkan untuk mengetahui Rasio Elektrifikasi (rumah tangga berlistrik dibanding jumlah rumah tangga seluruhnya) di Kabupaten Tanah Datar. Melihat dari data tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terdapat kenaikan persentasi rumah berlistrik sampai 93,39 %. Hal ini menunjukkan kondisi yang sangat baik, tetapi dari segi jumlah rumah yang belum berlistrik sekitar 6.040 rumah lagi maka ini adalah jumlah yang sangat besar dan menjadi tantangan tersendiri kedepannya.

2.3.4 Bidang Tenaga Kerja

Indikator kinerja untuk bidang Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10

Indikator Kinerja Bidang Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Kabupaten Tanah Datar

No	Indikator	Pencapaian Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	8	15	14	11	13
2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	8	14	14	45,5	10
3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	5,12	6,95	14,69	20,5	0,091
4.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	2.221	2.634	3.109	3.618	4.351
5.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	0	80	192	288	112
6.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	100	100	100	100	100
7.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (*)	372	449	355	378	349

Masalah utama Bidang Ketenagakerjaan sampai saat ini adalah semakin bertambahnya jumlah angkatan kerja pada setiap tahun yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja (lowongan kerja) yang ada, hal ini jelas akan menambah jumlah pengangguran pada setiap tahunnya.

Masalah lain yang masih dihadapi adalah rendahnya produktivitas kerja, rendahnya tingkat pengupahan, masih terjadinya perselisihan hubungan kerja/industrial, terbatasnya informasi pasar kerja yang tersedia baik keluar negeri maupun untuk pasar kerja yang ada di dalam negeri.

Adapun gambaran keadaan Ketenagakerjaan di Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2016 sampai dengan akhir tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.11
Kondisi Ketenagakerjaan
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020

Kegiatan	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angkatan Kerja (Orang)	164.485	166.245	172.880	174.454	179.341
Bekerja (Orang)	157.144	160.062	166.215	168.968	170.744
Penganggur (Orang)	7.341	6.183	6.665	5.486	8.597
Penduduk Usia Kerja	246.753	249.895	250.914	252.374	258.359
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	66,66	66,51	68,90	69,13	69,42
Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) (%)	4,02	3,72	4,01	3,20	4,79
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%)	95,98	96,28	95,99	96,80	95,21
Pencari Kerja Terdaftar (AK1)			2573	1980	1378

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2021

Adapun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tanah Datar secara umum dari tahun 2016-2020 cenderung naik dari 66,66 persen, 68,49 persen dan 66,66 persen seperti terlihat pada tabel dibawah.

Sedangkan untuk Tingkat Pengangguran Terbuka selama periode tahun 2018-2020 di Kabupaten Tanah Datar masih termasuk rendah meskipun jumlahnya terus mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 penduduk Kabupaten Tanah Datar yang menganggur adalah sebanyak 5486 orang dengan tingkat pengangguran 3,20 persen. Kemudian pada tahun 2020 tidak seperti yang diharapkan karena jumlah pengangguran bertambah menjadi 8597 orang dengan tingkat pengangguran juga naik 4,79 persen dikarenakan adanya wabah covid 19 yang mengakibatkan banyaknya tenaga kerja yang dirumahkan dan sulitnya mencari atau membuka lapangan kerja baru

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan D1/D2/D3 sampai dengan S1, S2 dan S3.

Tabel 2.12

Rasio Kualitas Tenaga Kerja Terhadap Jumlah Penduduk, 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Lulusan DI/DII/DIII	3.225	5.799	5.515	6.999	7.046
2.	Jumlah Lulusan DIV/S1/S2/S3	15.539	12.289	13.116	18.765	16.910
3.	Rasio Lulusan D1/D2/D3	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
4.	Rasio Lulusan S1/S2/S3	0,045	0,035	0,038	0,054	0,045

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2020 bahwa rasio Lulusan S1/S2/S3 sebanyak 0,045 lebih banyak dari Rasio Lulusan D1/D2/D3 yaitu 0,02.

Tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar dilihat melalui tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar tahun 2016 – 2020 yang diukur melalui hasil evaluasi terhadap pencapaian target kinerja *output* sesuai tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar .

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Secara operasional Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar dimulai pada awal tahun 2024 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2024. Sebagai salah satu Kabupaten yang mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian;.

Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian merupakan salah satu OPD pemberi Pelayanan Ketenagakerjaan dan pengembangan IKM dalam bidang perindustrian.

Berdasarkan kinerja pelayanan, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan Tenaga Kerja dan Perindustrian.

Tantangan dan Peluang Pengembangan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Tantangan yang dihadapi dimasa yang akan datang antara lain :

- Tingkat Pengangguran Terbuka
- Kontribusi PDRB Industri Pengolahan
- Pergeseran sektor ekonomi tradisional (Pertanian) ke sktor Industri dan jasa
- Produktivitas Tenaga Kerja

Disamping tantangan terdapat pula peluang guna peningkatan pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar, antara lain :

- Tingginya komitmen pimpinan dan perangkat daerah untuk mendorong pengembangan IKM di daerah
- Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja terdidik dan terampil (kompeten)
- Tersedianya lahan untuk pengembangan
- Adanya inovasi dalam meningkatkan layanan perizinan dan nonperizinan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi potensial
- Adanya dukungan penuh dari Kepala Daerah terhadap kendala masyarakat dalam modal usaha dengan adanya progul Makan Rendang

sehingga dapat terbantunya masyarakat dalam modal

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah Pencari Kerja pemula yang belum memiliki keterampilan atau kompetensi di bidang yang dibutuhkan dan dan IKM yang ada di Nagari yang memiliki potensi dalam pengembangan industri olahan di Kabupaten Tanah Datar,

2.1.5 Mitra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam Pemberian Pelayanan

Berikut adalah daftar Mitra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang berkaitan dengan pengembangan Tenaga Kerja dan Perindustrian :

1. Kelompok IKM (Industri Kecil Menengah) yang ada di 75 Nagari di Kabupaten Tanah Datar.
2. Tenaga Kerja yang terdaftar ataupun belum terdaftar dalam setiap Angkatan kerja yang ada di Kabupaten Tanah Datar
3. OPD pendukung penurunan angka pengangguran dan OPD yang mendukung terciptakan lapangan Pekerjaan (DKUKMP, PMPTSP, Dinas Pertanian, Dinas Perkim LH, BPKD, Dinas Kominfo, Dinas Parpora, Sekretariat Daerah)

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar

Dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam menghadapi tantangan dan permasalahan yang dihadapibaiik dari sisi internal maupun external yang berkembang daan dinamis.

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian yang berkaitan dengan pengembangan Perindustrian dan Ketenagakerjaan dapat diidentifikasi permasalahan yang diperkirakan terjadi selama lima tahun kedepan antara lain :

a. Ketenagakerjaan

- 1) Masih terdapat angka pengangguran di Kabupaten Tanah Datar;
- 2) Kurangnya lapangan kerja di sektor formal dan informal di Kabupaten Tanah Datar;
- 3) Masih rendahnya kualitas SDM angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan kompetensi pasar tenaga kerja;
- 4) Pelayanan penempatan tenaga kerja dan informasi pasar kerja belum optimal;
- 5) Minimnya fasilitas, sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja
- 6) Masih rendahnya iklim usaha untuk Penumbuhan wirausaha baru
- 7) Belum optimalnya fasilitasi terhadap Pekerja Migran Indonesia

(PMI) dan Purna PMI;

- 8) Belum tersedianya tenaga fungsional dalam penyelesaian Hubungan Industrial (Mediator);
- 9) Belum optimalnya Hubungan Industrial yang baik.
- 10) Produktivitas tenaga kerja yang masih rendah.
- 11) Masih tingginya Tingkat pengangguran terbuka.

b. Perindustrian

- 1.) Masih kurangnya kemandirian IKM dalam mengelola dan menghasilkan produk olahan.
- 2) Kompetensi dan keterampilan pelaku IKM yang belum memadai dalam persaingan dunia usaha.
- 3) Modal Awal yang belum mencukupi dalam membiayai produk olahan.
- 4) Peluang Pasar yang belum banyak dalam menjual produk Olahan
- 5) Kontribusi PDRB dari sektor industri olahan masih rendah.

c. Energi dan Sumber Daya Mineral

- 1) Potensi Energi Terbarukan (Panas Bumi, PLTM) belum terinventarisir dengan baik.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Dengan kata lain, visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar merupakan bentuk ungkapan kondisi yang ingin diwujudkan hingga tahun 2026.

Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 – 2029 adalah : **“Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Maju dan Berkelanjutan Berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS SBK)”** Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dimaksud adalah:

Madani Adalah masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang beradab dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat demokratis serta maju dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Maju Kabupaten Tanah Datar yang maju dalam arti mandiri untuk memenuhi kebutuhan pangan, pendapatan perkapita tinggi, tingkat pengangguran rendah, tingkat kemiskinan rendah, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kualitas infrastruktur yang baik, dan harapan hidup tinggi, sehingga mampu berdaya saing dalam

	menciptakan inovasi untuk mengatasi permasalahan dan mempunyai <i>Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Datar</i> 44 ketahanan ekonomi yang kuat terhadap tantangan global di masa mendatang, ditunjang oleh tata Kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>).
Berkelanjutan	Berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan hak dan sumber daya untuk generasi mendatang. Konsep ini menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang inklusif, keadilan sosial dan pelestarian lingkungan hidup.
Nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah	adalah kondisi dimana seluruh unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama Islam.

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tanah Datar Madani yang Maju dan Berkelanjutan berdasarkan Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah, ditetapkan lima sasaran Visi yaitu peningkatan pendapatan per kapita, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan berkurang, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan daya saing sumber daya manusia, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Sasaran pertama, peningkatan pendapatan per kapita mengacu pada upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Kabupaten Tanah Datar. Peningkatan pendapatan per kapita dapat dicapai melalui upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berbasis pada peningkatan sektor pertanian, pariwisata, pengembangan industri pengolahan, pemberdayaan UMKM, pengolahan sampah dan peningkatan investasi di berbagai sektor. Sasaran kedua, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan berkurang, merupakan tujuan utama dalam pembangunan berkelanjutan. *Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Datar* 45 Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2024 adalah sebesar 4,28%, masih lebih baik dibandingkan angka provinsi dan nasional. Upaya pengentasan kemiskinan dapat melibatkan serangkaian kegiatan yang terkoordinasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan taraf hidup Masyarakat seperti meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, memberikan akses dalam pengembangan UMKM, menerapkan program perlindungan sosial serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di daerah.

Sasaran ketiga, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, melibatkan serangkaian langkah dan strategi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pemerintah daerah, Pentingnya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah agar dapat mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, efisiensi dan pengelolaan sumber daya yang baik, peningkatan pembangunan ekonomi lokal, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan Tingkat kepuasan masyarakat, peningkatan keseimbangan dan Pembangunan regional, pengembangan inovasi dan teknologi serta peningkatan citra dan reputasi daerah. Sasaran keempat, peningkatan daya saing sumber daya manusia, melibatkan peningkatan kualitas, keterampilan dan kapasitas individu serta kelompok dalam memenuhi tuntutan pasar kerja dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dapat diwujudkan melalui pendidikan yang berkualitas,

peningkatan akses pendidikan, pelatihan keterampilan dan pengembangan profesional, serta kewirausahaan dan inovasi. Sasaran kelima, peningkatan kualitas lingkungan hidup merupakan aspek penting untuk mendukung kehidupan yang sehat dan berkelanjutan dan diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. Strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai hal tersebut diantaranya penyusunan kebijakan lingkungan, penegakan peraturan lingkungan, pengelolaan limbah efektif, promosi energi terbarukan,

pendidikan dan kesadaran masyarakat, *Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Datar* 46 pengembangan perekonomian hijau serta pengukuran dan pemantauan kualitas lingkungan. Untuk mencapai visi yang telah dirumuskan, maka disusunlah 7 (tujuh) misi pembangunan jangka menengah yang menggambarkan strategi yang akan ditempuh, yaitu:

1. Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya Merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya melalui peningkatan peran lembaga agama, adat dan budaya, untuk memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas dan masyarakat guna memantapkan ketahanan sosial budaya.
2. Mewujudkan transformasi sosial melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing Mewujudkan Transformasi Sosial menuju Masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing diwujudkan dengan membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera unggul dan berdaya saing.
3. Mewujudkan transformasi ekonomi yang berbasis pertanian, pariwisata, UMKM dan peningkatan investasi Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berkeadilan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pendapatan perkapita tinggi, meningkatnya produktivitas dan nilai tambah, meningkatnya investasi dan meratanya pendapatan masyarakat. Transformasi ekonomi didukung dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, penerapan digitalisasi, dan inovasi serta menerapkan prinsip-prinsip ekonomi hijau yang menekankan pada penggunaan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien Mewujudkan transformasi tata kelola dengan membangun system pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, adaptif, dan inklusif serta berorientasi pelayanan. *Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Tanah Datar* 47
5. Mewujudkan dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan Mewujudkan dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dengan Menyediakan infrastruktur berkualitas dan ramah lingkungan, melestarikan lingkungan serta meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana.
6. Memantapkan keamanan daerah, demokrasi dan stabilitas ekonomi makro daerah Memantapkan keamanan daerah, demokrasi dan stabilitas ekonomi makro daerah dengan Memperkuat keamanan di tingkat daerah mencakup aspek penegakan hukum, menjaga ketentraman dan ketertiban umum, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. serta membangun pondasi ekonomi yang kuat.
7. Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan Berkeadilan Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis kawasan,

pembangunan nagari yang lebih maju, mandiri dan berdaya saing tinggi. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mendukung pencapaian misi ke 6 (enam) pada RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2025-2029. Tujuan dari misi ke 6 (enam) yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yaitu Terwujudnya Stabilitas Makro Ekonomi Daerah.

2.2.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program kerja. Isu-isu ini akan menjadi fokus utama, sehingga dapat dipastikan bahwa kegiatan yang dijalankan relevan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Isu Strategis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam rangka pencapaian target sebagai berikut :

1. Pergeseran sektor ekonomi tradisional (Pertanian) ke sektor Industri dan jasa ;
2. Kontribusi PDRB industri pengolahan
3. Produktivitas Tenaga Kerja
4. Tingkat pengangguran terbuka

Isu Strategis Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian

Keuangan

Isu strategis yang selaras dengan sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Keuangan adalah tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah pada dana transfer masih tinggi disebabkan banyak daerah belum mampu mengoptimalkan potensi pendapatan lokal. Selain itu masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak daerah menjadi isu strategis dalam meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Isu Strategis Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Provinsi Sumatera Barat

Berikut adalah isu strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Provinsi, yang ditinjau dari sasaran jangka menengah dalam Rencana Strategis (Renstra) mereka. Isu-isu ini mencerminkan tantangan dan prioritas yang dihadapi Nakerin dalam upaya meningkatkan jumlah IKM menjadi IKM yang mandiri dan berkembang dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta ikut serta mengurangi Tingkat pengangguran terbuka. Salah satu sasaran strategis Provinsi Sumatera Barat adalah meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah dengan cara pengembangan sektor-sektor unggulan daerah, peningkatan efisiensi pemungutan pajak dan retribusi, serta diversifikasi sumber pendapatan daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar, maka unit organisasi harus merumuskan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa maksud dan tujuan organisasi.

Melalui perumusan Misi Kabupaten Tanah Datar akan memberikan arah jangka panjang dan terciptanya stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan Kabupaten Tanah Datar, meletakkan acuan dan pedoman dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan pemerintahan serta memberikan kenyamanan dan ketentraman kepada masyarakat Kabupaten Tanah Datar terutama yang berada pada daerah yang rawan bencana, sehingga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari akan selalu merasa tenang dalam beraktivitas dan bekerja. Berikut dapat dilihat tujuan dan sasaran Jangka Menengah pelayanan SKPD seperti tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja dan Wirausaha baru	Persentase Pencari Kerja yang dilatih berbasis kompetensi	15 %	17%	19%	20%	25%
			Terciptanya wirusaha pemula (orang)	500	550	600	650	700
			Persentase penempatan pencari kerja yang terdaftar	5,5%	5,6%	5,8%	5,9%	6,1%
			Tingkat Produktivitas tenaga kerja	4305, 179	4865, 989	5426, 799	5987, 609	6548, 419
		Meningkatkan hubungan industrial	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	5	7	9	10	12

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Berbasis Kerakyatan	Mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif yang didukung oleh potensi energi						
			Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin	0	25	50	75	100
3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan melalui Mall Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	84	86	88	91
			Jumlah Instansi yang tergabung dalam Mall Pelayanan Publik	0	5	8	10	12
			Nilai SAKIP perangkat daerah	B (68)	BB (71)	BB (75)	BB (80)	A (91)
			Indeks RB perangkat daerah	B (65)	B (70)	BB (73)	BB (78)	A (81)

3.4 Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten

Tanah Datar

Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan fungsinya menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yaitu “Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian .” Berikut tabel sinkronisasi antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan :

- 1,. Meningkatkan Pergeseran sektor ekonomi tradisional (Pertanian) kesektor indistri dan jasa:
 - a. Meningkatkan Jumlah IKM Industri dan Jasa.
 - b. Meningkatkan Jumlah IKM sertifikat halal
 - c. Meningkatkan Jumlah IKM digitalisasi
 - d. Meningkatkan IKM usaha pertambangan dan penambangan.
2. Meningkatkan Kontribusi PDRB Industri pengolahan :
 - a. Meningkatkan Penguatan teknologi pengolahan modern
 - b. Meningkatkan Nilai Produksi
 - c. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja
3. Meningkatkan Produktivitas tenaga kerja
 - a. Meningkatkan output dan efisiensi
 - b. Meningkatkan kualitas kerja
 - c. Pemanfaatan sumber daya efisien
 - d. meningkatkan inovasi dan kreativitas
4. Optimalisasi perluasan kesempatan kerja di sektor formal dan informal untuk Menurunkan Tingkat pengangguran terbuka
 - a. Menyebarluaskan informasi tentang bursa tenaga kerja
 - b. Menjalin kerjasama dengan lembaga- lembaga untuk penempatan tenaga kerja
5. Penguatan peran BLK dalam peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga kerja
 - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana BLK
 - b. Meningkatkan kompetensi instruktur dan tenaga fungsional lainnya

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Tanah Datar

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Daya Saing Industri, Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui tata kelola yang Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja	- Peningkatan keterampilan, kompetensi dan kualitas produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing. - Meningkatkan Kualitas tenaga kerja - Pemanfaatan sumber daya yang efisien - Meningkatkan inovasi dan kreativitas
		Optimalisasi perluasan kesempatan kerja disektor formal dan informal untuk menurunkan Tingkat pengangguran terbuka	- Menyebarluaskan informasi tentang bursa tenaga kerja - Menjalin kerjasama dengan lembaga- lembaga untuk penempatan tenaga kerja
		Penguatan peran BLK dalam peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga kerja	- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana BLK - Meningkatkan kompetensi instruktur dan tenaga fungsional lainnya
		Meningkatkan kualitas perencanaan tenaga kerja	Menyusun database tenaga kerja
	Meningkatnya produktivitas ekonomi berbasis, Koperasi, Usaha Mikro/IKM, Industri Pengolahan dan BUMD	Meningkatkan Pergeseran sektor ekonomi tradisional (Pertanian) kesektor indistri dan jasa	- Meningkatkan Jumlah IKM Industri dan Jasa - Meningkatkan Jumlah IKM sertifikat halal - Meningkatkan Jumlah IKM digitalisasi - Meningkatkan IKM usaha pertambangan dan penambangan

		Meningkatkan Kontribusi PDRB Industri pengolahan	- Meningkatkan Penguatan teknologi pengolahan modern - Meningkatkan Nilai Produksi - Meningkatkan penyerapan tenaga
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Meningkatkan kualitas pelayanan non perizinan	- Meningkatkan sarana prasarana pelayanan - Memenuhi kebutuhan terhadap komponen standar pelayanan publik
		Menindaklanjuti semua pengaduan masyarakat yang beridentitas jelas	- Peningkatan fungsi layanan pengaduan
		Penataan sistem, norma mekanisme dan prosedur pelayanan public	- Menyusun peta proses bisnis perangkat daerah - Menyusun NSPK

BAB IV

PROGRAM KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta indikator kinerja masing-masing kegiatan setiap tahunnya selama lima tahun disusun sejalan dengan strategi dan kebijakan yang ditetapkan. Penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta indikator kinerja masing-masing kegiatan setiap tahunnya selama lima tahun disusun sejalan dengan strategi dan kebijakan yang ditetapkan. Penetapan Program dan Kegiatan Indikatif Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Tahun 2021-2026 untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian

Penetapan program merupakan pelaksanaan kebijakan organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar. Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis ini merupakan program dan kegiatan yang bersifat indikatif sebagai berikut :

Selama tahun 2024 pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Nakerin). Berikut ini pencapaian program dan kegiatan menurut sasaran dan indikator kinerja

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Terdapat 2 (dua) sub kegiatan dalam rangka mencapai sasaran ini sebagai berikut :
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan DPA-SKPD Perencanaan Perangkat Daerah.
Output Sub kegiatan ini berupa 9 (Sembilan) Dokumen perencanaan dan Penganggaran.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
Output Sub kegiatan ini berupa 4 (empat) Dokumen capaian kinerja.
 2. Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Output Sub kegiatan ini berupa pembayaran gaji dan tunjangan 28 (dua puluh delapan) Aparatur Sipil Negara (ASN).
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD
Output Sub kegiatan ini berupa 2(dua) dokumen laporan keuangan.

3. Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Output Sub kegiatan ini berupa pengiriman Bimbingan Teknis untuk 3 (tiga) orang pegawai.
4. Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
Output Sub kegiatan ini berupa 9 (Sembilan) paket alat listrik.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Peralatan Kantor
Output Sub kegiatan ini berupa 1 (satu) paket pembelian perlengkapan peralatan kantor.
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Output Sub kegiatan ini berupa 24 (dua puluh empat) paket pembelian bahan logistik kantor.
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
Output Sub kegiatan ini berupa 6 (enam) paket pencetakan dan penggandaan.
 - e. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
Output Sub kegiatan ini berupa penyediaan makanan dan minuman tamu.
 - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
Output Sub kegiatan ini berupa 12 (dua belas) laporan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi.
5. Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
Output Sub kegiatan ini berupa pengadaan 1(satu) paket Mebel kantor.
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Output Sub kegiatan ini berupa pengadaan 1(satu) paket peralatan kantor.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Terdapat 3 (tiga) sub kegiatan dalam rangka mencapai sasaran ini sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Output Sub kegiatan ini berupa pengadaan 40 (empat puluh) lembar Materai.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Output Sub kegiatan ini berupa pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Output Sub kegiatan ini berupa 12 laporan dan Pembayaran 4 (empat) jasa tenaga lainnya.

7. Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Terdapat 3 (tiga) sub kegiatan dalam rangka mencapai sasaran ini sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
Output Sub kegiatan ini berupa pemeliharaan 4 (empat) unit kendaraan roda empat, 3 (tiga) unit roda dua dan pembayaran 1 (satu) jasa tenaga lainnya.
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
Output Sub kegiatan ini berupa belanja pemeliharaan 2 (dua) unit peralatan kantor.
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya.
Output Sub kegiatan ini berupa pembayaran belanja pemeliharaan 2 (dua) unit gedung dan Pembayaran 2 (dua) jasa tenaga lainnya.

II. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi

- a. Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
Output Sub kegiatan ini berupa Pelatihan bagi 224 orang pencari kerja dan pembayaran 3 (tiga) jasa tenaga lainnya.
- b. Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
Output Sub kegiatan ini berupa pembinaan pada 11 lembaga pelatihan kerja swasta.

III. Program Penempatan Tenaga Kerja

Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Di Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja
Output Sub Kegiatan ini berupa pengiriman 10 tenaga kerja keluar Negeri.
- b. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
Output Sub Kegiatan ini berupa registrasi pada 1200 pencari kerja dan Pembayaran 2 (dua) jasa tenaga lainnya.

IV. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan

Kegiatan Penatausahaan izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/ Kota

- a. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota
Output Sub Kegiatan ini berupa 1 (satu) Laporan tentang potensi energi terbarukan.

V. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

1. Kegiatan: Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - a. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
output Sub kegiatan ini berupa 1 (satu) dokumen pelaksanaan pelatihan dan pembayaran 3 (tiga) jasa tenaga lainnya.
 - b. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
Output Sub kegiatan ini berupa 1 (satu) dokumen kegiatan sentra tenun dan pembayaran 9 (sembilan) jasa tenaga lainnya
 - c. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
Output Sub kegiatan ini berupa 1 (satu) dokumen pembangunan Sentra Hortikultura.
 - d. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
Output Sub kegiatan ini berupa 1 (satu) dokumen Dekranasda dan pembayaran 5 (lima) jasa tenaga lainnya

Program yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan keterkaitannya dengan kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel 6.1 (T.C.27) berikut ini :

Tabel 4.1 (T C 27)

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp)				
											Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19	20			
						Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian																
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																
							Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				48 Orang			428.190.700	476.294.700	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian			
	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pelaksanaan pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-			16 lembaga											
	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																
							Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				11 Lembaga			1.000.000	1.000.000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian			
301	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penurunan Angka Pengangguran	-			4.21 Persen											
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	pelaksanaan pelayanan pembekalan antar kerja antar daerah(AKAD) dan terapan teknologi tepat guna, tenaga kerja siap pakai bagi pencari kerja	-			100 %											
	2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja																

							Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				10 Orang				1.500.000	1.500.000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian			
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelaksanaan operasional pelayanan informasi Pasar Kerja (IPK) online dan penyebarluasan bursa tenaga kerja	-			100 %												
	2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																	
		###					Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				1200 Orang				51.376.800	51.376.800	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian			
302	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan pembinaan dan pengawasan hubungan industrial perusahaan dan pekerja	-			100 Persen												
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikannya perselisihan hubungan industrial di tingkat perusahaan	-			100 %												
	2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi																	
							Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				5 Asosiasi dan Serikat Pekerja				23.104.000	-	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian			
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																	
303	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen												
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	-			100 %												
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen				4.000.000	4.000.000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian			
	2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	

[illegible]

						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket			3.000.000	4.000.000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				30 Dokumen					Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu												
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan			1.000.000	6.000.000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				215 Laporan			10.000.000	26.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	-			100 %							
	2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit			5.600.000	52.875.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				18 Unit			4.270.000	82.070.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %							
	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan			400.000	400.000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan			100.000.000	149.000.000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan			103.244.462	103.244.462	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkategori baik	-			100 %								
	2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit			97.090.409	97.090.409	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit			600.000	600.000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit			51.376.800	51.376.800	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL													
304	3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	cakupan pengelolaan dan pengembangan energi baru terbarukan	-			100 Persen								
	3	29	05	2.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota													
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan			3.000.000	3.000.000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													
305	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pengembangan IKM Sentra Tenun dan Pengembangan IKM Pada sentra IKM Potensial	-			18 IKM								
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Pengembangan IKM pada Sentra Potensial	-											
	3	31	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri													

						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen			291.191.600	141.191.600	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri												
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen			243.099.400	243.099.400	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri												
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen			10.724.606.000	10.614.606.000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat												
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen			307.112.580	367.112.580	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	JUMLAH												15.565.515.214	15.589.376.465				

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029, telah memuat beberapa indikator kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar melalui beberapa program prioritas pembangunannya. Indikator tersebut merupakan indikator yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun dimulai tahun 2025 hingga tahun 2029 lengkap dengan kondisi yang diinginkan pada akhir tahun kelima.

Indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2025-2029 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Datar sebagaimana terlihat pada tabel 7.1 berikut ini :

Tabel 7.1

Indikator kinerja Nakerin Kabupaten Tanah Datar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	34,31	34,62	34,93	35,24	35,55	35,86
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	66,04	66,72	67,4	68,08	68,76	69,44
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota	12,91	13,33	13,75	14,17	14,59	15,01
6	Terciptanya wirusaha pemula (orang)	500	550	600	650	700	

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten	N ih il	N ih il	N ih il	N ih il	N ih il	
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	84	86	88	91	
9	Nilai SAKIP perangkat daerah	B (68)	BB (71)	BB (75)	BB (80)	A (91)	
10	Indeks RB perangkat daerah	B (65)	B (70)	BB (73)	BB (78)	A (81)	

BAB V

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar.

Rencana Strategis ini merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang kinerja Pelayanan, Isu-isu Strategis yang perlu diselesaikan, penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Kebijakan yang akan di tempuh dalam waktu lima tahun mendatang.

Renstra Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian ini akan dituangkan kedalam Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar setiap tahunnya. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar sebagaimana tertuang dalam Renstra ini, memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari OPD/Instansi/Lembaga terkait serta Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

Keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian ini serta hambatan yang ditemukan, akan tergambar nantinya dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang akan disusun setiap tahunnya.

Batusangkar,

2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH DATAR


Drs. SUHERMEN

NIP. 196606091986021001